

Lampiran II. SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
 Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
 Tanggal : 30 Mei 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA

- JABATAN :** Sekretaris
- TUGAS :** Membantu Inspektur melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- FUNGSI :**
1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Inspektorat.
 2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat.
 3. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akuntabilitas pelaporan dan kinerja Inspektorat	Nilai Sakip Inspektorat Kab. Batola minimal B.	➤ Inspektorat sebagai salah satu SKPD yang dituntut juga untuk meningkatkan nilai Sakip minimal B. ➤ Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan yang mendukung penilaian Sakip dimaksud. ➤ Formulasinya: Setiap unsur penilaian Sakip memperoleh nilai rata-rata B.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
2	Meningkatnya pemenuhan SDM yang Kompeten.	Persentase Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang bersertifikat Diklat Substantif.	➤ Semua PFT Pengawasan harus bersertifikat Diklat Substantif, secara bertahap sesuai perkembangan, dan penganggaran. ➤ Formulasinya: PFT yang bersertifikat Diklat Substantif dibagi jumlah semua pengawas X 100%.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Persentase PFT Pengawasan Inspektorat Kab. Batola yang lulus Diklat Penjenjangan	➤ Peserta yang mengikuti Diklat PFT Pengawas semestinya lulus Diklat penjenjangan, dalam rangka peningkatan kompetensinya. ➤ Formulasinya: PFT yang lulus Diklat Penjenjangan dibagi dengan jumlah peserta yang mengikuti Diklat X 100 %.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

3	Meningkatnya pemenuhan sarpras yang standar	Persentase Sarpras yang Terpenuhi	➤ Keberhasilan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan tidak terlepas dengan kegiatan penunjang, dalam hal ini terpenuhinya Sarpras yang memadai. ➤ Formulasinya: Sarparas yang memadai dan memenuhi standar dibagi semua sarpras yang tersedia/yang dibeli/disediakan X 100 %.	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan, keuangan dan Aset
4	Meningkatnya Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pelimpahan Kasus aduan masyarakat dari APH yang selesai ditangani	➤ Pelimpahan kasus aduan menjadi tugas penting sebagai penjamin pelaksanaan pengawasan intern, yang harus ditangani, hal ini sebagai wujud koordinasi antara APH dan APIP. ➤ Formulasinya: Pelimpahan aduan yang ditangani dibagi jumlah aduan yang diterima X 100 %.	Sekretaris	APH
		Persentase pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani	➤ Kasus pelimpahan OTT yang selesai ditangani menjadi salah satu indikasi kinerja APIP, dan menjadi tanggung jawab pengendali intern. ➤ Formulasinya: Pelimpahan kasus OTT yang selesai ditangani dibagi jumlah pelimpahan yang masuk X 100 %.	Sekretaris	APH

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002

Lampiran III. SK Inspektur Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 188/19/Inspektorat/2018
Tanggal : 30 Mei 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO KUALA**

JABATAN : Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

TUGAS : Membantu Inspektur menyiapkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

FUNGSI :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
3. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu sesuai ketentuan perundang-undangan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Persentase SAKIP SKPD dengan Nilai minimal B	➤ Indikator Kinerja SAKIP SKPD ini, dimaksud adalah membantu Inspektur untuk jaminan terhadap upaya meningkatkan penilaian pelaksanaan SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. ➤ Belum SKPD yang melaksanakan SAKIP sesuai ketentuan dan belum sempurna sehingga secara bertahap untuk meningkatkan nilai setiap unsur menjadi penting, nilai B adalah capaian moderat, yang hendak dicapai. ➤ Formulasinya: Jumlah SKPD yang memperoleh Nilai SAKIP B, dibagi dengan semua SKPD yang dilakukan penilaian X 100 %.	Irban I, II, III dan IV	Seluruh SKPD lingkup Pemkab. Batola.

		Persentase SKPD yang melaksanakan program/kegiatan telah memenuhi unsur Efektif, Efisien, dan Ekonomis	➤ Indikator Kinerja Pelaksanaan Program ini, memberikan dukungan jaminan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD dapat diukur efektif, efisien dan ekonomisnya, sehingga setiap rupiah anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat. ➤ Formulasinya: Jumlah program /kegiatan yang dilaksanakan SKPD sesuai dengan Rencana dan berhasil guna dibagi jumlah program/kegiatan yang direncanakan yang diaudit X 100 %.	Urban I, II, III dan IV	SKPD yang Menjadi Objek Pemeriksaan
2	Meningkatnya Kepatuhan SKPD Terhadap Peraturan Per Undang-undangan	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	➤ Indikator Kinerja Temuan APIP ini, merupakan tindak lanjut proses pemeriksaan yang dilaksanakan, sehingga temuan yang menjadi rekomendasi APIP dapat diperbaiki, diselesaikan, sehingga dampak dari kerugian, kesalahan, ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat diminimalisir. ➤ Formulasinya: Jumlah temuan APIP yang ditindaklanjuti dibagi jumlah SKPD yang diperiksa X 100 %.	Urban I, II, III dan IV	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
		Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	➤ Indikator Kinerja Temuan BPK ini, merupakan perpanjangan tindak lanjut proses pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, sehingga temuan yang menjadi rekomendasi BPK dapat diperbaiki, menyelesaikan temuan, sehingga dampak dari kerugian, kesalahan, ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat diminimalisir. ➤ Formulasinya: Jumlah Rekomendasi BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi BPK RI X 100 %.	Urban I, II, III dan IV	Hasil Rekonsiliasi Penyelesaian TLHP dengan BPK RI.
3	Meningkatnya Cakupan SKPD dengan laporan Keuangan baik	Jumlah rekomendasi atas revidi Laporan Keuangan yang selesai ditindaklanjuti.	➤ Indikator Kinerja Rekomendasi ini, menjadi bagian penting untuk penyempurnaan laporan keuangan SKPD, sehingga dapat meminimalisir pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai ketentuan maupun berdampak kerugian keuangan Negara. ➤ Formulasinya: Jumlah rekomendasi Hasil Revidi LK yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah semua rekomendasi Hasil Revidi LK X 100 %.	Urban I, II, III dan IV	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
4	Tertanganinya pengaduan masyarakat dengan baik	Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.	➤ Indikator Kinerja Pengaduan ini memberikan jaminan bahwa pemerintah sangat pro-aktif terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang patut ditindaklanjuti, sebagai bukti peran masyarakat dalam pembangunan. ➤ Formulasinya: Jumlah pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti dibagi semua jumlah pengaduan yang diterima X 100 %.	Urban I, II, III dan IV	Sekretaris
5	Meningkatnya pelaksanaan SPIP SKPD Pemkab. Batola	Persentase SKPD dengan SPIP Level III	➤ Indikator Kinerja SPIP ini menjadi sangat penting dalam upaya untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan SKPD dalam menerapkan SPIP disemua jenjang, ➤ Formulasinya: SKPD dengan SPIP Level III dibagi semua SKPD X 100 %.	Urban I, II, III dan IV	Urban I, II, III dan IV.

		Jumlah SKPD yang telah mengimplementasi kan SPIP dengan baik	➤ IKU ini memberikan korelasi terhadap pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019 yang menekankan bahwa tahun 2019 semua Kabupaten Maturitas SPIP Level III. ➤ Dengan demikian Inspektorat selaku SKPD yang berwenang untuk mengawal upaya Tingkat Maturitas dimaksud menjadi sangat penting dan mendasar. ➤ Formulasinya: SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP dengan baik di bagi semua SKPD x 100 %.	Irban I, II, III dan IV	Quetioner yang dibagikan kepada seluruh SKPD.
--	--	--	--	-------------------------	---

INSPEKTUR,

Drs. JOHAN ARIFIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19581209199103 1 002